

**FUNGSI MANAJEMEN PENERIMAAN KEUANGAN  
DAERAH DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**N U F A I L I  
NPM : 09.851.0005**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : FUNGSI MANAJEMEN PENERIMAAN KEUANGAN  
DAERAH DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  
SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG

NAMA : NUFAILI  
NIM : 09 851 0005  
JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI : ILMU SOSIAL DAN POLITIK

MENGESAHKAN:  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H.M.HUSNI THAMRIN NST, M. Si

Drs. M.ASWIN HSB, M.AP



DEKAN

Drs. HIRWAN NASUTION, S.Pd, M.AP

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI MANAJEMEN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG**

**OLEH :**

**NUFAILI**

**NIM. 098510005**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Fungsi manajemen penerimaan keuangan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Deli Serdang adalah untuk menyetorkan penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah. Selain itu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya, bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana fungsi manajemen penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Deli Serdang?

Langkah-langkah yang dilakukan agar penerimaan keuangan daerah khususnya retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat mencapai target adalah Melaksanakan MOU ( perjanjian ) kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Lubuk Pakam tentang persidangan keliling permohonan perkara perdana pencatatan kelahiran dan juga dengan instansi yang terkait misalnya : Bidan atau Rumah Sakit. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya data-data pencatatan sipil.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan keuangan daerah khususnya retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adalah diberlakukannya program E-KTP oleh pemerintah pusat yang biayanya ditanggung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan atau pencatatan sipil.

Kata Kunci : Manajemen Penerimaan Keuangan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“FUNGSI MANAJEMEN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG”**.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah mendukung penulis hingga skripsi ini selesai tepat waktu nya. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang telah memotivasi saya juga terimakasih kepada suami saya dan semua teman-teman serta kepada pihak-pihak yang turut mendukung saya hingga skripsi ini selesai.

Demikianlah kata pengantar ini saya sampaikan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi saya.

Medan, Maret 2013

Penulis

**NUFAILI**  
**NIM. 098510005**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Abstrak.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Hipotesis .....	10

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Manajemen .....	11
B. Fungsi Manajemen .....	13
C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .....	14
D. Undang-undang Yang Mengatur Tentang Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pancatatan Sipil .....	15

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Populasi dan Sampel.....	21
B. Teknik Pengumpulan Data .....	22
C. Variabel Penelitian .....	25
D. Metode Analisis Data .....	26



E. Teknik Analisis Data .....	27
-------------------------------	----

## BAB IV : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang .....	26
B. Visi, Misi dan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.....	30
C. Program .....	34
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	36
E. Pemantapan Penerapan Norma Dasar Pencatatan Sipil .....	38
F. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
G. Kabupaten Deli Serdang .....	40
H. Tujuan dan Sasaran.....	41
I. Strategi Dan Kebijakan .....	43
J. Sistem Koordinasi Yang Diterapkan .....	45
K. Hubungan Komunikasi Dengan Koordinasi .....	50

## BAB V : Analisis dan Evaluasi

1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	54
2. Fungsi Manajemen di Bidang Penerimaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	68

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Koordinasi Kerja Serta Usaha-Usaha Mengatasinya .....	69
4. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	71
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	76

## LAMPIRAN



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Sumatera Utara mempunyai letak yang cukup strategis karena posisinya yang berada pada jalur pelayaran Selat Malaka. Sumatera Utara memiliki luas yang mencapai 71,680 Km atau sekitar 3,5 persen dari total luas Indonesia. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Dulu wilayah ini disebut *Kabupaten Deli dan Serdang*, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Pembangunan di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus

melalui peningkatan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dengan berbagai karakteristik masing-masing.

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, dilihat dari nilai proyek yang dikerjakan, pembangunan yang dilaksanakan sebenarnya dapat dirasakan oleh seluruh daerah, namun sumber pembiayaan atau pendanaan masih didukung oleh anggaran pemerintah pusat sehingga daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya sendiri secara maksimal dan mandiri.

Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Manajemen Organisasi*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Daft, *Fungsi Manajemen*, PT Gunung Agung, Jakarta, 2003.
- Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 2006.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_Penerimaan\\_Keuangan](http://en.wikipedia.org/wiki/Manajemen_Penerimaan_Keuangan), Desember, 2012.
- James A.F. Stoner, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Marry Parker Follet, *Manajemen*, Michigan Press. Jakarta, 1996.
- Sugianto, *Pajak & Retribusi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2011.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000.
- Zainal, Muhammad, *Manajemen Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Konsep Pajak*, Masbied.com, 2011.



Nomor : 050 /F.5/I.2.b/2013  
Lamp : ~  
Hal : Pengambilan Data

09 Februari 2013

Kepada , Yth. Bapak Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Catatan Sipil  
Pemerintah Kabupaten Deli Serang  
Di -  
Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Nufaili  
NPM : 09.851.0005  
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Adapun tujuan Pengambilan Data tersebut adalah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Skripsi " *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang*" .

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data tsb semata-mata hanya untuk pendalaman Materi Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kami mohon juga kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Pengambilan Data tersebut dan setelah selesai dapat kiranya mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Pengambilan Data pada Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan,  
Drs.H.Irwan Nasution,SPd,MAP



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**  
JL. KARYA USAHA NOMOR 3 TEL. 7951489  
LUBUK PAKAM

Lubuk Pakam, 08 Maret 2013

Nomor : 470 /366 /DKCS/2013  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Telah Selesai Pengambilan Data

Kepada Yth ,  
Sdr.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Medan  
Area

di-  
Medan

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor:050/F.5/1.2.b/2013 dan Nomor: 051/F.5/1.2.b/2013 tanggal 09 Februari Perihal Pengambilan Data , bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa saudara:

1. Nama : N U F A I L I A  
NPM : 09.851.0005  
Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan
  
2. Nama : R A M L A H  
NPM : 09.851.0004  
Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah selesai melaksanakan pengambilan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 Februari s/d 11 Maret 2013.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n.Kepala Dinas Kependudukan dan

